



LOGICAL FALLACY DALAM NARASI MEDIA CNN INDONESIA
'PEMERINTAHAN BONEKA DI ERA JOKOWI-JK'

Dini Sri Istiningdias, Gili Argenti
Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)
(Naskah diterima: 1 September 2019, disetujui: 28 Oktober 2019)

Abstract

This research aims to determine the causes of governance in the Jokowi-JK era called a puppet government; identify the types of Logical Fallacy contained in news of puppet governments in the Jokowi-JK era; and analyze the result impact from Logical Fallacy in the news of the puppet government in the Jokowi-JK era. The research method was conducted using qualitative descriptive method. Based on reports in the Indonesian CNN media that Jokowi-JK began to be imaged as a puppet government since the 2014 presidential election season. This is indicated when Megawati once called Jokowi a party official. The public is concerned that if the head of state got intervention from the interests of the bearer party, it will harm the interests of the Indonesian people. This causes the fallacy or fallacy on the type of fallacies of relevance. This type of fallacy is a misguided thought that occurs because the narration given is not directed to the real problem but is directed to the personal condition and personal characteristics of the person (the interlocutor) who are actually not relevant to the truth or error of the contents of the argument. After being observed and analyzed, the results of the study show that there are three types of Logical Fallacy identified in the online reporting of CNN Indonesia, namely the Argument against the Reason / Argument of Ad Hominem, The Appeal to the Populace Type, and the Missing The Point Type Ignoratio Elenchi). The impact that resulted from the three types of Logical Fallacy in the Indonesian CNN online coverage was the emergence of hoax reporting on puppet government which harmed Jokowi-JK in his role in running the government.

Keyword: Logical Fallacy, Narration Media, A Puppet Government.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemerintahan pada era Jokowi-JK disebut sebagai pemerintahan boneka; mengidentifikasi jenis *Logical Fallacy* yang terdapat dalam berita pemerintahan boneka di era Jokowi-JK; dan menganalisis dampak yang dihasilkan dari *Logical Fallacy* dalam berita pemerintahan boneka di era Jokowi-JK. Metode penelitian dilakukan dengan metode deskripsif kualitatif. Berdasarkan pemberitaan di media CNN Indonesia bahwa Jokowi-JK mulai dicitrakan sebagai pemerintahan boneka sejak musim pemilihan presiden tahun 2014. Hal ini terindikasi saat Megawati pernah menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Masyarakat mengkawatirkan jika kepala negara mendapatkan intervensi dari kepentingan partai pengusung sehingga akan merugikan kepentingan masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan terjadinya *fallacy* atau kesesatan pada tipe *fallacies of relevance*. *Fallacy* jenis ini adalah sesat pikir yang terjadi karena narasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang

sesungguhnya tetapi terarah kepada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang (lawan bicara) yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya. Setelah diobservasi dan dianalisis maka hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Tiga tipe *Logical Fallacy* yang teridentifikasi dalam pemberitaan online CNN Indonesia yaitu Tipe *Argument against The Reason / Argument Ad Hominem*, Tipe *The Appeal to The Populace (Argumentum Ad Populum)*, dan Tipe *Missing The Point (Ignoratio Elenchi)*. Dampak yang dihasilkan dari tiga tipe *Logical Fallacy* dalam pemberitaan online CNN Indonesia adalah timbulnya pemberitaan *hoax* mengenai pemerintahan boneka yang merugikan Jokowi-JK dalam perannya menjalankan pemerintahan.

Keyword: *Logical Fallacy*, Narasi Media, Pemerintahan Boneka.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah, dengan daerah otonomi yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan sedangkan bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, dan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Dasar

Republik Indonesia pada Bab I Pasal 1 ayat 1 sampai 3.

Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang Presiden yang telah dipilih melalui sebuah pemilihan Presiden. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet dimana Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri, dengan kata lain menteri bertanggung jawab terhadap Presiden. Kemudian seorang Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen dan dalam peraturan perundangan di Indonesia hal tersebut disebutkan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia pada Bab III tentang Presiden dan Wakil Presiden.

Pada masa kini, seseorang yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ialah Ir. Joko Widodo. Dimana beliau diusung dari

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sesuai dengan aturan perundang-undangan Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden serta kabinet menteri, namun beberapa isu mengatakan bahwa partai pengusung dari seorang Presiden memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi bahwa Presiden Joko Widodo sebagai Presiden yang dipengaruhi oleh sebuah partai dengan istilah “Presiden Boneka” atau “Jokowi Boneka”.

Hal ini didukung dengan pernyataan seorang pengamat politik, seperti yang dikutip dalam berita online nasional sindonews.com dalam wawancaranya (<https://nasional.sindonews.com/read/864703/113/jokowi-mundur-saja-kalau-cuma-capres-boneka-pdip-1400405711>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019) :

Menurut pengamat politik dari Labore Institute Indonesia, Andry William Sinaga, Jokowi gamang dan seperti boneka saja, yang dapat dibawa dan dioper kemana-mana. Jokowi harus tegas menunjukkan bahwa Jokowi bukan Presiden bonekanya PDIP dan Megawati.

Mengenai tudigan tersebut, ketua umum PDIP pun memberikan tanggapannya tentang istilah “Presiden Boneka” atau “Jokowi Boneka”. Seperti yang dikutip dalam berita online merdeka.com dalam wawancaranya(<https://www.merdeka.com/politik/ini-pembelaan-megawati-soal-tudingan-jokowi-capres-boneka.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2019):

Menurut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, Boneka siapa? Dia orang partai. Saya ketua umum. Saya mengumumkan dia sebagai calon presiden.

Kedua contoh tersebut menimbulkan terjadinya *fallacy* atau kesesatan, dimana tipe dari fallacy ini atau kesesatan ini berada pada tipe *fallacies of relevance* atau kesesatan relevan. *Fallacies of relevance* atau kesesatan relevan adalah sesat pikir yang terjadi karena narasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya tetapi terarah kepada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang (lawan bicara) yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya. Kesesatan ini timbul apabila orang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premis nya. Artinya secara logis kesimpulan tersebut tidak terkandung dalam atau tidak merupakan

implikasi dari premisnya. Jadi penalaran yang mengandung kesesatan relevansi tidak menampakkan adanya hubungan logis antara premis dan kesimpulan, walaupun secara psikologis menampakkan adanya hubungan - namun kesan akan adannya hubungan secara psikologis ini sering kali membuat orang terkecoh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “*Logical Fallacy* dalam Narasi Media CNN Indonesia ‘Pemerintahan Boneka di Era Jokowi-JK’”.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pemerintahan Boneka

Pada umumnya yang disebut dengan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan,

pembangunan pemberdayaan dan perlindungan.

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan negara menunjukkan adanya badan pemerintahan (institutional), kewenangan pemerintah (authority), cara memerintah (methods), wilayah pemerintahan (state, local, district, rural and urban) dan sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Pemerintahan tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan pemerintah untuk memerintah yang merupakan keharusan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan pemerintahan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata ‘Boneka’ adalah tiruan anak untuk permainan, anak-anakan, orang yang hanya menjadi mainan orang lain. Kata boneka sudah tidak lagi asing di telinga masyarakat Indonesia. Begitu pula dalam konteks politik banyak yang menggunakan kata “boneka” sebagai penganalogan, dan hampir sebagian masyarakat sudah memahami kemana arah kata “boneka” itu ditujukan. Dalam ranah politik “boneka” adalah sebuah analogi untuk menggambarkan seseorang. Dalam dunia politik “boneka” adalah mereka para penguasa yang dikendalikan oleh suatu pihak. Pemerintahan boneka adalah sebuah

penganalogian untuk menyebut suatu pemerintahan yang memiliki peranan tetapi bukan dengan arti sebenarnya. Boneka dalam politik adalah pemimpin atau pemegang kekuasaan yang secara resmi di akui secara hukum dan Undang- Undang, dalam konteks ini berarti pemimpin Negara atau Presiden.

Namun, secara politik pemerintahan tersebut bekerja di bawah control seseorang baik itu perorangan ataupun kleompok. Boneka secara harfiah berarti dimana pemerintahannya dapat di samakan seperti boneka yang dimainkan oleh orang lainnya sebagai dalang.

2.2 Logical Fallacy

Fallacy atau kesesatan ialah kesalahan yang sering terjadi dalam aktivitas berfikir karena penyalahgunaan bahasa (verbal) dan / atau relevansi. Kesesatan atau fallacy merupakan bagian logika yang memperlajari beberapa jenis kesesatan penalaran sebagai lawan dari narasi logis. Kesesatan atau fallacy terjadi karena ketidak tepatan bahasa antara lain disebabkan oleh pemilihan terminologi yang salah sedangkan ketidak tepatan relevansi bisa disebabkan oleh:

1. Pemilihan premis yang tidak tepat (membuat premis dari proposisi yang salah).

2. Proses penyimpulan premis yang tidak tepat (premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan).

Sementara itu, pengertian *logical fallacy* atau kesesatan logika, merupakan cacat atau sesat penalaran yang tidak hanya sering (secara tidak sengaja) digunakan oleh orang-orang yang kemampuan penalarannya terbatas, tetapi juga sering (secara sengaja) digunakan oleh orang-orang tertentu, termasuk media untuk memperngaruhi orang lain.

Fallacies of relevance adalah tipe *logical fallacy* yang paling sering ditemui. *Fallacy* tipe ini adalah *fallacy* yang memiliki pernyataan atau narasi yang tidak sesuai dengan konklusinya. Tipe *fallacy* ini seringkali digunakan oleh para peneliti yang senang “memaksakan” sesuatu pernyataan agar terlihat logis. Ada tujuh *fallacy* tipe relevan ini, yaitu:

1. The Appeal To The Populace

Fallacy yang muncul karena konklusinya mengacu pada anggapan yang bersifat popular.

2. The Appeal To The Emotion

Fallacy yang timbul dari narasi pemikiran yang bersifat mengasihani, bermurah hati, ketidaktegaan atau terkait dengan hati nurani. Cirinya adalah

menggunakan manipulasi perasaan (emosi) seseorang dalam berargumen daripada membuat argumen yang logis.

3. *The Red Herring*

Fallacy yang mengalihkan perbincangan dari permasalahan utama. Tujuannya adalah untuk membingungkan orang atau untuk mengalihkan fokus orang lain.

4. *The Straw Man*

Fallacy yang narasinya selalu menempatkan posisi “lawan” sebagai posisi yang ekstrim, mengancam, atau tidak masuk akal daripada kenyataan atau fakta yang sebenarnya terjadi. Cirinya adalah membuat interpretasi yang salah dari argumen orang lain agar lebih mudah diserang.

5. *The Attack On The Person*

Fallacy yang narasiya menyerang pihak (orang) tertentu yang sedang memegang peranan. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan citra pihak tertentu dengan narasi yang tidak didasari fakta yang jelas.

6. *The Appeal To Force*

Fallacy yang narasinya dibekali oleh kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut bisa berasal dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk “memaksa”.

7. *Missing The Point (Irrelevant Conclusion)*

Fallacy yang narasinya tidak terkonstruksi kuat, sehingga ketika ada bantahan dari narasi lain maka narasi awal menjadi lemah dan malah mendukung konklusi yang berbeda daripada mendukung narasi itu sendiri. Atau dengan kata lain premis-premis awal terbantahkan sehingga menghasilkan konklusi yang mengikuti alur narasi si pembantah.

2.3 Narasi

Menurut Keraf (2010: 136), narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi. Dengan kata lain, narasi berusaha menjawab sebuah pertanyaan “apa yang telah terjadi”. Bentuk karangan ini berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa yang seolah-olah pembaca dapat melihat dan dapat mengalami peristiwa itu. Unsur yang penting dalam narasi ini adalah perbuatan atau tindakan dan rangkaian waktu peristiwa itu terjadi.

Keraf (2010: 136–137) membagi karangan narasi menjadi dua jenis, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif.

1) Narasi Ekspositoris

Narasi ekspositoris adalah narasi yang bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Sasaran utama jenis narasi ini berupa perluasan pengetahuan para pembaca setelah selesai membaca kisah tersebut. Narasi ini berusaha menyampaikan informasi suatu peristiwa yang berlangsung. Persoalan yang diangkat dalam narasi ekspositoris pun merupakan tahap-tahap kejadian dan rangkaian-rangkaian perbuatan yang disajikan kepada para pembaca. Peristiwa ini disajikan secara runut dimaksudkan agar informasi dalam narasi mampu memperluas pengetahuan atau pengertian pembaca. Narasi ekspositoris dapat bersifat generalisasi dan dapat bersifat khas atau khusus. Narasi ekspositoris bersifat generalisasi apabila narasi tersebut berusaha menyampaikan suatu proses yang umum, yang dapat dilakukan siapa saja, dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya, wacana yang menceritakan bagaimana seseorang membuat roti. Sementara itu, narasi ekspositoris bersifat khusus apabila berusaha mengisahkan suatu kejadian yang khas, dan hanya terjadi satu kali. Kejadian yang dikisahkan ini hanya terjadi pada suatu waktu tertentu.

Wacana ini berupa pengalaman seseorang pertama kali mengarungi samudra. Menurut Zahara dan Husin (2009: 25), contoh narasi ekspositoris ini yaitu biografi, autobiografi, laporan perjalanan, dan lain-lain.

2) Narasi Sugestif

Narasi sugestif adalah narasi yang bertujuan untuk memberi makna atau peristiwa sebagai suatu pengalaman, bukan untuk memperluas pengetahuan informasi seseorang. Narasi jenis ini selalu melibatkan imajinasi pembaca karena sasaran utamanya adalah makna peristiwa. Penyajian kisah dalam narasi sugestif dibuat dengan rangkaian-rangkaian sedemikian rupa sehingga merangsang imajinasi pembaca. Pembaca dapat menarik suatu makna yang secara jelas setelah selesai membaca narasi ini. Berdasarkan pengertian di atas, perbedaan narasi ekspositoris dan narasi sugestif menurut Keraf (2001: 138–139) dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Narasi Ekspositoris	Narasi Sugestif
1.	Memperluas Pengetahuan	Menyampaikan Makna
2.	Menyampaikan informasi suatu peristiwa	Melibatkan Imajinasi
3.	Didasarkan pada penalaran untuk	Penalaran berfungsi

4.	mencapai kesepakatan nasional Bahasanya condong ke bahasa informatif sehingga menitikberatkan kata-kata denotatif	sebagai alat penyampaian makna Bahasanya cenderung figuratif sehingga menitikberatkan kata-kata konotatif
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan pengertian narasi di atas, dapat disimpulkan bahwa narasi adalah wacana yang menggambarkan kronologi peristiwa dalam rangkaian waktu tertentu. Melalui wacana ini, pembaca dibuat seolah-olah dapat merasakan peristiwa demi peristiwa yang terjadi.

2.4 Media

Kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut AECT (melalui Arsyad, 2011: 3), media diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Di sisi lain, pengertian media menurut Soeparno (1980: 1) adalah suatu alat yang merupakan saluran untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima.

Dari beberapa definisi para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa media merupakan Jadi, media merupakan alat perantara yang diciptakan untuk menyalurkan pesan dengan tujuan agar pemakai dapat lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan.

III. METODE PENELITIAN

Bogdan dan Tylor (dalam Maleong, 2014: 4) mendefinisikan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu misalnya: kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Adapun pelaksanaan observasi dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a.Tahap persiapan

Peneliti terlebih dahulu menetapkan artikel berita dari media CNN Indonesia ‘Pemerintahan Boneka di Era Jokowi-JK’ yang akan diobservasi.

b.Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti mengklasifikasi narasi media dan narasi informan yang terdapat pada artikel media CNN Indonesia sebagai sampel penelitian, kemudian mengidentifikasi jenis Logical Fallacy yang terdapat dalam berita tersebut. Logical Fallacy yang teridentifikasi kemudian dianalisis sampai ditemukan hasil berupa hoax, gimmick, atau playing victim.

c.Bentuk observasi

Yang dimaksud bentuk observasi adalah mengklasifikasi dan mengidentifikasi secara langsung terhadap aspek yang diobservasi.

IV. HASIL PENELITIAN

Logical Fallacy pada Narasi Berita Tipe Argument Against The Reson (Argument Ad Hominem)

“Pemerintahan Jokowi-JK Dianggap Pemimpin Boneka” adalah headline dari pemberitaan online pada media CNN. Judul pemberitaan tersebut menunjukkan terjadinya *logical fallacy* pada narasi baik dari media ataupun informan di dalamnya. ‘Jokowi’ menjadi tokoh yang sering dikaitkan dengan peranannya sebagai ‘boneka’ dari partai yang mengusungnya hingga menempati beberapa posisi penting seperti Walikota Solo, Gubernur Jakarta, dan Presiden Republik

Indonesia. Keberadaan ‘Jokowi’ yang memegang peranan penting dalam pemerintahan dapat menarik pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan menjatuhkan tanpa fakta yang jelas.

Kalimat ‘Pemerintahan Jokowi-JK dianggap Pemimpin Boneka’ teridentifikasi sebagai bentuk *logical fallacy* yang diciptakan oleh media CNN Indonesia. Jenis *logical fallacy* yang teridentifikasi dalam narasi tersebut adalah tipe *argument against the reason / argument ad hominem*. Narasi Pemerintahan Jokowi-JK dianggap Pemimpin Boneka terlihat menyerang sosok Jokowi dan JK sebagai orang-orang yang memegang peranan penting dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menjatuhkan citra Jokowi-JK dengan narasi yang tidak didasari fakta.

Tipe The Appeal To The Populace (Argumentum Ad Populum)

“Survei Indo Barometer menunjukkan indikator kegagalan tertinggi dalam pemerintahan Jokowi-JK dalam 2,5 tahun terakhir adalah anggapan dikendalikan oleh pihak lain dan dinilai sebagai pemimpin boneka.”

Paragraf pertama pada pemberitaan online CNN Indonesia terindikasi mengandung *Logical Fallacy* tipe *The Appeal*

to The Populace (Argumentum Ad Populum). Fallacy ini muncul karena kesimpulannya mengacu pada anggapan yang bersifat popular mengenai kegagalan pemerintahan Jokowi-JK dalam 2,5 tahun terakhir. Survey mengenai kegagalan ini kemudian dianggap sebagai dampak dari pemerintahan boneka yang dijalankan oleh Jokowi-JK. Padahal hasil survei tersebut belum cukup valid untuk mengindikasikan adanya pemerintahan boneka pada era Jokowi-JK. Hal ini bisa memicu timbulnya berita hoax yang akan merugikan Jokowi-JK dalam perannya menjalankan pemerintahan.

“Survei itu menunjukkan terdapat 20 indikator kegagalan selama Jokowi-JK memimpin dalam 2,5 tahun terakhir. Satu hal tertinggi adalah anggapan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap sebagai pemimpin boneka yakni mencapai 13,1%.”

Paragraf di atas juga mengandung *Logical Fallacy* tipe *The Appeal to The Populace (Argumentum Ad Populum)*. Argumen pemberitaan online CNN Indonesia ini menggiring opini publik dengan melihat salah satu indikator kegagalan tertinggi dari pemerintahan Jokowi-JK dari 20 indikator yang disediakan oleh lembaga Survei Indo

Barometer tanpa penjelasan mengenai keterkaitan indikator kegagalan dengan adanya asumsi pemerintahan boneka di era Jokowi-JK. “Persepsi publik terhadap kegagalan pemerintahan Jokowi-JK di antaranya...dikendalikan pihak lain, pemimpin boneka 13,1 %, terlalu pro-China 6,2 %,” demikian hasil survei tersebut yang dikutip CNN Indonesia.com, Kamis (23/3).

Persepsi publik tertinggi yang disebutkan pada kutipan pemberitaan online CNN Indonesia di atas juga mengandung *Logical Fallacy* tipe *The Appeal to The Populace (Argumentum Ad Populum)*. Hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan rujukan ‘persepsi publik’ yang dijadikan data survei oleh Indo Barometer sehingga dapat menggiring anggapan bahwa publik yang mengikuti survey tersebut lebih banyak yang sepakat menyetujui adanya pemerintahan boneka.

Sepuluh indikator kegagalan lainnya adalah harga kebutuhan pokok belum stabil (11,7%); pelayanan kesehatan buruk (7,9%); perekonomian rakyat (6,4 %); terlalu pro China (6,2%); stabilitas politik (5,4%); keterbatasan lapangan pekerjaan (5,4%); penegakan hukum tak netral (5,3%); kasus

SARA (5,1%), kualitas pendidikan (4,3%); dan pemberian KIP belum merata (4,3%).

Indikator kegagalan pada perolehan %tase hasil survei dalam pemberitaan online CNN Indonesia menunjukkan adanya *Logical Fallacy* tipe *The Appeal to The Populace (Argumentum Ad Populum)*. Harga kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, perekonomian rakyat, stabilitas politik, lapangan pekerjaan, penegakan hukum, kasus SARA, kualitas pendidikan, dan pemberian KIP merupakan program kerja pemerintahan sedangkan indikator pro China ataupun pemimpin boneka bukan termasuk program kerja pemerintahan yang sulit diukur kegagalan serta keberhasilannya. Indikator program kerja tidak lebih diperhatikan apabila dibandingkan dengan indikator lainnya seperti ‘dikendalikan pihak lain, pemimpin boneka, dan pro-china’ sehingga %tase tertinggi pada hasil survei tersebut terlihat belum cukup valid untuk membuktikan adanya pemerintahan boneka.

Tipe Missing The Point (*Ignoratio Elenchi*)

“Walaupun demikian, persepsi publik tentang indikator keberhasilan pemerintahan Jokowi memiliki %tase lebih tinggi yakni 17,6% untuk indikator program pembangunan yang meningkat.

Sedangkan indikator lainnya di antaranya adalah pelayanan pendidikan lebih baik (10,1%); Kartu Indonesia Sehat (7,0%); infrastruktur jalan lebih baik (6,9%); ketstabilan harga di kawasan terpencil (6,8%); kebijakan tol laut (6,6%) dan pemberantasan korupsi (5,8%).”

Dua paragraf lainnya dalam pemberitaan online CNN Indonesia tersebut, menunjukkan adanya tipe *Logical Fallacy* lainnya pada headline “Pemerintahan Jokowi-JK Dianggap Pemimpin Boneka” yaitu tipe *Missing The Point (*Ignoratio Elenchi*)*. Narasi pada headline tersebut tidak terkonstruksi kuat sehingga ketika ada narasi lain dari 2 paragraf di atas maka anggapan mengenai pemerintahan boneka menjadi lemah serta terbantahkan. Indikator keberhasilan yang lebih tinggi dari kegagalan pemerintahan Jokowi-JK melalui survei yang disampaikan melalui pemberitaan online CNN Indonesia justru menjadi bukti bahwa tidak adanya pengendalian terhadap Jokowi-JK dari pihak manapun.

“Di sisi lain, lembaga survei itu juga menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama dua setengah tahun menjabat sebesar 66,4 %. Tingginya tingkat kepuasan tersebut

berdampak pada peluang Jokowi terpilih kembali dalam Pemilihan Presiden tahun 2019.” Hal yang sama juga ditunjukkan oleh narasi di atas, bahwa terjadi *Logical Fallacy* tipe *Missing The Point (Ignoratio Elenchi)* pada headline “Pemerintahan Jokowi-JK Dianggap Pemimpin Boneka”. Tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja Jokowi-JK selama 2,5 tahun justru memberi peluang Jokowi untuk terpilih kembali pada periode berikutnya. Berdasarkan narasi-narasi di atas terlihat CNN Indonesia membuat bingung publik mengenai tujuan yang disampaikan melalui pemberitaan tersebut dan semakin jauh dari indikasi pemerintahan boneka.

“Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi disebabkan oleh tertampungnya sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Aspirasi itu, kata dia, dinilai oleh responden direalisasikan oleh Jokowi.”

“Tingkat kepuasan publik atas kinerja Jokowi sebesar 66,4 %, tidak puas 32%, dan tidak tahu sebesar 1,6 %,” ujar Qodari dalam keterangan pers.”

Narasi yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer semakin memperkuat adanya *Logical Fallacy* tipe *Missing The Point (Ignoratio Elenchi)* pada headline “Pemerintahan Jokowi-JK Dianggap Pemimpin Boneka” pada pemberitaan online CNN Indonesia. Muhammad Qodari secara jelas menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat telah direalisasikan oleh Jokowi. Aspirasi yang direalisasikan oleh Jokowi merupakan pembuktian bahwa tidak adanya pemerintahan boneka yang dijalankan oleh Jokowi-JK.

“Kantor Sekretariat Presiden dalam situsnya menjelaskan keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam 2 tahun terakhir. Di antaranya adalah jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan menjadi 28,01 juta penduduk pada Maret 2016 dari sebelumnya 28,51 juta penduduk.”

“Ketimpangan antara kaya dan miskin terus mengalami penurunan yang terlihat dari indeks rasio Gini,” demikian laporan resmi pemerintah.

Penurunan rasio itu adalah 0,39 pada Maret 2016 dari sebelumnya 0,40 pada Maret 2015. Pemerintah Jokowi-JK juga mengatakan angka pengangguran pun terus

mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

Tiga paragraf di atas semakin mempertegas adanya adanya *Logical Fallacy* tipe *Missing The Point (Ignoratio Elenchi)* pada headline “Pemerintahan Jokowi-JK Dianggap Pemimpin Boneka” pada pemberitaan online CNN Indonesia. Hal ini terlihat pada setiap kesimpulan dari narasi pemberitaan yang mengacu pada tingkat keberhasilan seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran dalam 2 tahun terakhir pada periode pemerintahan Jokowi-JK.

Hoax yang dihasilkan dari Logical Fallacy

Logical Fallacy yang teridentifikasi pada pemberitaan online CNN Indonesia dengan headline “Pemerintahan Jokowi-JK Dianggap Pemimpin Boneka” yaitu *Argument against The Reason / Argument Ad Hominem*, *The Appeal to The Populace (Argumentum Ad Populum)*, dan *Missing The Point (Ignoratio Elenchi)*.

Tipe *Argument against The Reason / Argument Ad Hominem* ditunjukan dengan adanya narasi Pemerintahan Jokowi-JK yang dianggap Pemimpin Boneka terlihat menyerang sosok Jokowi dan JK sebagai orang-orang yang memegang peranan penting dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk

menjatuhkan citra Jokowi-JK dengan narasi yang tidak didasari fakta.

Tipe *The Appeal to The Populace (Argumentum Ad Populum)* ditunjukan dengan adanya survey mengenai %tase kegagalan yang dianggap sebagai dampak dari pemerintahan boneka yang dijalankan oleh Jokowi-JK. Padahal hasil survey tersebut belum cukup valid untuk mengindikasikan adanya pemerintahan boneka pada era Jokowi-JK. Adanya ketidakjelasan rujukan ‘persepsi publik’ yang dijadikan data survei oleh Indo Barometer sehingga dapat menggiring anggapan bahwa publik yang mengikuti survey tersebut lebih banyak yang sepakat menyetujui adanya pemerintahan boneka. Indikator program kerja tidak lebih diperhatikan apabila dibandingkan dengan indikator lainnya seperti ‘dikendalikan pihak lain, pemimpin boneka, dan pro-china’ sehingga %tase tertinggi pada hasil survei tersebut terlihat belum cukup valid untuk membuktikan adanya pemerintahan boneka. Tipe *Missing The Point (Ignoratio Elenchi)* ditunjukan dengan adanya indikator keberhasilan yang lebih tinggi dari kegagalan pemerintahan Jokowi-JK melalui survey yang disampaikan melalui pemberitaan online CNN Indonesia justru menjadi bukti bahwa

tidak adanya pengendalian terhadap Jokowi-JK dari pihak mana pun. Tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja Jokowi-JK selama 2,5 tahun justru memberi peluang Jokowi untuk terpilih kembali pada periode berikutnya. Berdasarkan narasi-narasi di atas terlihat CNN Indonesia membuat bingung publik mengenai tujuan yang disampaikan melalui pemberitaan tersebut dan semakin jauh dari indikasi pemerintahan boneka. Aspirasi yang disampaikan masyarakat telah direalisasikan oleh Jokowi serta tingkat keberhasilan seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran dalam 2 tahun terakhir pada periode pemerintahan Jokowi-JK menjadi pembuktian yang tidak terbantahkan.

Tiga tipe *Logical Fallacy* yang teridentifikasi dalam pemberitaan online CNN Indonesia dapat memicu timbulnya berita hoax yang akan merugikan Jokowi-JK dalam perannya menjalankan pemerintahan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jokowi-JK mulai dicitrakan sebagai pemerintahan boneka sejak musim pemilihan presiden tahun 2014. Hal ini terindikasi saat Megawati pernah

menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Masyarakat mengkahawatirkan jika kepala negara mendapatkan intervensi dari kepentingan partai pengusung sehingga akan merugikan kepentingan masyarakat Indonesia.

2. Tiga tipe *Logical Fallacy* yang teridentifikasi dalam pemberitaan online CNN Indonesia yaitu Tipe *Argument against The Reason/Argument Ad Hominem*, Tipe *The Appeal to The Populace (Argumentum Ad Populum)*, dan Tipe *Missing The Point (Ignoratio Elenchi)*.
3. Dampak yang dihasilkan dari tiga tipe *Logical Fallacy* dalam pemberitaan online CNN Indonesia adalah timbulnya pemberitaan hoax mengenai pemerintahan boneka yang merugikan Jokowi-JK dalam perannya menjalankan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoiri, El Khoiri dan Utami Widiawati. *Logical Fallacies in Indonesian EFL Learners' Argumentative Writing: Students' Perspectives*. Penerbit: Dinamika Ilmu.
- Saunders, Kevin W. 1993. *Informal Fallacies in Legal Argumentation*. Publisher: Michigan State University College Of Law.

Rahadi, Dedi Rianto. 2017. *Perilaku Pengguna dan Informasi HOAX*. Penerbit: *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab III tentang Presiden dan Wakil Presiden.

Amin, Al. 2014. *Ini pembelaan Megawati soal tudangan Jokowi capres “boneka”*. <https://www.merdeka.com/politik/ini-pembelaan-megawati-soal-tudingan-jokowi-capres-boneka.html>

Akuntono, Indra. 2014. *Warna Merah dan Putih Hiasi Tempat Pelantikan Jokowi-JK*. <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/20/08245461/Warna.Merah.dan.Putih.Hiasi.Tempat.Pelantikan.Jokowi-JK>

Atik, Mohammad. 2014. Jokowi mundur aja kalau Cuma capres boneka PDIP. <https://nasional.sindonews.com/read/864703/113/jokowi-mundur-saja-kalau-cuma-capres-boneka-pdip-1400405711>

Gery. 2014. *Jokowi dilantik hari ini sebagai Presiden Indonesia*. [https://www.bbc.com/indonesia/berita_inدونезия/2014/10/141016_jokowi_pers_iapanpelantikan](https://www.bbc.com/indonesia/berita_inдонезия/2014/10/141016_jokowi_pers_iapanpelantikan).

Perkasa, Anugerah. 2017. *Survei: Pemerintahan Jokowi-JK Dianggap Pemimpin Boneka*. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170323132949-32-202251/survei-pemerintahan-jokowi-jk-dianggap-pemimpin-boneka>.